

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan analisis mengenai dampak PDB, stabilitas politik, dan *tax ratio* terhadap *foreign direct investment*, kesimpulan dari pembahasan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang selama periode 1998–2023. Hal ini dapat disebabkan karena sebagian besar FDI yang masuk ke Indonesia bersifat *resource-seeking*, yaitu lebih tertarik pada ketersediaan SDA. Bahkan, banyak investor menggunakan Indonesia sebagai basis produksi untuk ekspor, bukan untuk melayani pasar dalam negeri, sehingga indikator PDB menjadi kurang relevan dalam menarik FDI.
2. Dalam jangka panjang maupun jangka pendek, stabilitas politik berpengaruh terhadap *foreign direct investment* di Indonesia periode 1998-2023. Hal ini menunjukkan bahwa investor asing sangat memperhatikan kondisi politik dalam mengambil keputusan investasi, karena stabilitas politik berkaitan langsung dengan kepastian hukum, keamanan berusaha, serta keberlanjutan kebijakan ekonomi.

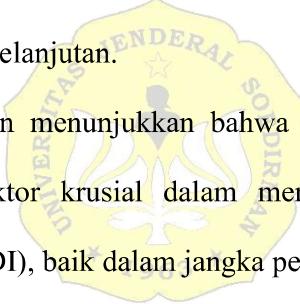
3. Dalam jangka panjang, *tax ratio* berpengaruh positif dan signifikan tetapi dalam jangka pendek *tax ratio* tidak berpengaruh terhadap *foreign direct investment* di Indonesia periode 1998-2023. *Tax ratio* yang meningkat secara konsisten menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak secara efektif, yang biasanya diikuti oleh perbaikan layanan publik, infrastruktur, dan kepastian hukum yang mana menjadi faktor pertimbangan investor untuk berinvestasi. Dengan kata lain, *tax ratio* dalam jangka panjang dilihat sebagai indikator stabilitas ekonomi dan kredibilitas kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan kepercayaan investor.

B. Implikasi

Implikasi yang dirumuskan berdasarkan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan FDI. Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro secara agregat belum cukup menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Artinya, peningkatan PDB belum tercermin sebagai indikator iklim investasi yang menjanjikan di mata investor, terutama jika tidak didukung oleh reformasi struktural dan kebijakan sektoral yang konkret. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya berfokus

pada pencapaian pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga mulai mengarahkan perhatian pada peningkatan efisiensi di tingkat mikro. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM perlu melakukan pemetaan yang lebih spesifik terhadap sektor-sektor yang dibutuhkan pasar global dan memiliki keunggulan komparatif nasional, serta merumuskan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan inklusif. Hal ini penting untuk memperkuat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di samping itu, pemerintah juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur dan fasilitas pendukung yang merata di seluruh daerah untuk menciptakan iklim investasi yang setara dan berkelanjutan.

- 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas politik merupakan salah satu faktor krusial dalam menarik minat Foreign Direct Investment (FDI), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menegaskan bahwa iklim politik yang stabil dan dapat diprediksi merupakan faktor utama dalam menarik minat investor asing. Ketidakpastian politik cenderung meningkatkan persepsi risiko, yang pada akhirnya dapat menghambat investasi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi investasi asing. Pemerintah perlu mengintegrasikan isu stabilitas politik sebagai bagian dari strategi nasional promosi investasi. Artinya, stabilitas politik tidak hanya menjadi domain

urusan dalam negeri, tetapi juga menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian daya saing investasi Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu memberikan transparansi dan kepastian bagi investor asing mengenai kondisi dalam negeri yang terkini dan terukur, perkuat koordinasi lintas lembaga dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk membentuk *task force* mitigasi risiko politik terhadap investasi, yang bertugas memetakan wilayah-wilayah rawan konflik politik dan memberikan *early warning system* kepada investor, mendorong desentralisasi investasi yang selektif dengan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki *track record* stabilitas politik yang baik.

3. Hasil temuan menunjukkan bahwa *tax ratio* berpengaruh positif terhadap FDI dalam jangka panjang. Implikasi dari temuan ini menuntut pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, untuk lebih memperhatikan stabilitas, transparansi, dan efisiensi sistem perpajakan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat daya saing investasi Indonesia. Selanjutnya, disarankan agar Kementerian Investasi dan BKPM bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyusun *tax incentive roadmap* yang terintegrasi dengan prioritas sektor hilirisasi. Misalnya, memberikan insentif secara selektif bagi investor asing yang menanamkan modalnya di sektor manufaktur berorientasi ekspor, energi terbarukan, atau industri strategis berbasis hilirisasi

sumber daya alam. Selain itu, DJP perlu melakukan reformasi digitalisasi layanan pajak sehingga prosedur perpajakan menjadi lebih sederhana dan transparan sehingga minim terjadinya *compliance cost*.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada metode perhitungan *tax ratio*, di mana rasio pajak dihitung hanya berdasarkan total penerimaan pajak yang mencakup pajak SDA dan pajak pusat, sedangkan perhitungan rasio pajak menurut IMF memuat enam komponen penting seperti pajak penghasilan, pajak atas gaji atau upah, pajak atas *property*, pajak atas barang/jasa, pajak atas perdagangan internasional dan transaksinya, dan sebagainya. Berdasarkan ke enam poin tersebut, IMF mendefinisikan perhitungan rasio pajak yang mencakup pajak dari BUMN dan juga pajak daerah. Dimana perhitungan rasio pajak di Indonesia mengabaikan kedua komponen tersebut.

Selain itu, data stabilitas politik pada tahun 1999 dan 2001 menggunakan interpolasi data akibat ketidaktersediaan data, sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengumpulan data primer atau pencarian sumber data sekunder lain yang lebih lengkap agar hasil estimasi lebih akurat dan tidak bergantung pada asumsi interpolasi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan metode perhitungan *tax ratio* yang lebih komprehensif, dengan memisahkan dan mempertimbangkan jenis-jenis pajak secara rinci, serta

menggunakan data panel dengan membandingkan FDI Indonesia dengan FDI negara lain sehingga jumlah sampel menjadi banyak dan hasilnya menjadi lebih signifikan.

